

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

5.1 Kesimpulan

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan untuk melihat kinerja urusan pemerintah dimata masyarakat.
- b. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bangka terkait penilaian masyarakat sudah pada nilai **80,13** atau kategori **B (Baik)**. Untuk urusan pemerintah Bidang Kependudukan dengan nilai 89,11 (A), Bidang Kesehatan dengan nilai 87,74 (A), urusan Pendidikan dengan nilai 80,45 (B), urusan Pangan Pertanian dengan nilai 80,81 (B), urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 80,62 (B), urusan Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai 79,93 (B), urusan Perpustakaan dan Kearsipan dengan nilai 79,81 (B).
- c. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bangka dapat juga dilihat berdasarkan wilayah administratif (kecamatan). Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka 8 kecamatan pada kategori B (Baik). Wilayah kecamatan yang indeks kepuasan masyarakat mendapat kategori B antara lain, Kecamatan Sungailiat, Kecamatan, Pemali, Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo barat, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Bakam, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu.

Sedangkan wilayah kecamatan dengan IKM kategori C tidak ada lagi di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka. Adapun nilai IKM per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Nilai IKM Urusan Pemerintah per Kecamatan

URUSAN PEMERINTAH WAJIB DAN PILIHAN	IKM BANGKA	IKM KEC. SUNGAILIAT	IKM KEC. PEMALI	IKM KEC. MERAWANG	IKM KEC. MENDO BARAT	IKM KEC. PUDING BESAR	IKM KEC. BAKAM	IKM KEC. RIAU SILIP	IKM KEC. BELINYU
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	89.11	89.90	89.61	88.52	88.63	88.59	88.78	88.64	88.83
KESEHATAN	87.84	88.77	86.42	84.70	88.55	81.00	85.70	82.68	88.94
PENDIDIKAN	80.45	84.21	82.68	82.74	83.23	81.63	81.72	81.93	83.86
SOSIAL	78.21	79.89	78.41	79.51	79.29	79.00	79.33	78.21	80.14
PERTANAHAN	79.83	80.51	79.54	77.77	79.43	78.57	77.11	79.02	79.23
PANGAN DAN PERTANIAN	80.81	82.33	80.16	78.02	79.64	78.85	78.96	78.70	79.91
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	78.64	85.17	78.37	78.14	79.74	78.40	77.67	77.85	75.36
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA	78.54	79.80	78.69	77.56	77.74	79.83	79.85	79.87	80.49
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA	78.82	81.76	78.79	77.55	78.85	77.21	76.53	77.12	78.14
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	79.18	82.51	79.88	78.37	78.85	77.57	77.86	77.75	78.81
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	80.62	81.90	79.28	76.59	76.10	78.80	77.44	79.02	78.57
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	79.93	81.53	79.59	76.30	77.41	78.40	76.67	78.71	77.53
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.79	80.80	79.83	77.73	77.02	79.10	77.54	79.05	77.72
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	78.58	79.80	79.94	77.72	77.60	77.60	74.16	79.30	75.55
USAHA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	79.28	80.35	79.79	79.41	78.37	78.15	79.81	78.41	79.97
PERIKANAN	79.56	82.67	78.84	79.54	79.43	78.58	78.85	78.82	79.73
PENANAMAN MODAL	78.81	79.89	79.31	79.42	79.26	79.20	78.02	76.12	79.26
LINGKUNGAN HIDUP	78.23	83.55	77.35	77.82	78.05	78.07	77.61	75.33	78.10
PERHUBUNGAN	79.58	79.61	79.87	79.77	79.91	79.88	79.83	77.92	79.82
TENAGA KERJA	78.29	80.65	78.07	78.38	78.01	78.25	77.68	77.42	77.87
PERDAGANGAN	79.11	79.98	79.16	79.08	79.12	79.18	79.16	78.07	79.15
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	79.81	80.43	79.66	79.61	78.83	79.87	79.67	79.66	80.74
IKM	80.13	82.09	80.15	79.82	79.77	79.81	79.81	78.90	80.72

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan beberapa permasalahan diatas, maka perlu disampaikan beberapa hal sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja urusan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bangka , antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan transparansi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai keberadaan OPD beserta seluruh tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut.

- b. Mengingat pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kinerja secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka survey Indeks Kepuasan Masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan dan periodik di tahun-tahun mendatang. Sehingga berdasarkan hasil survey IKM tersebut, OPD dapat melakukan perbaikan mutu pelayanan dan kinerja sesuai hasil penilaian dari masyarakat.